

STRATEGI JEPANG DALAM MERESPON ANCAMAN MILITER KOREA UTARA

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat

*Untuk memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*

Universitas Andalas

Oleh:

DONNA AZKA ALVIORA JAYA

2210852036



**DEPARTEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS**

2026

ABSTRAK

Perkembangan program nuklir dan rudal balistik Korea Utara yang semakin pesat sejak pengesahan *Japan's New Security Bills* pada tahun 2015 telah meningkatkan ancaman terhadap keamanan Jepang. Namun demikian, adanya keterbatasan yang bersumber dari Pasal 9 Konstitusi Jepang membatasi penggunaan kekuatan militer, sehingga Jepang membutuhkan strategi yang lebih efektif dalam merespon ancaman Korea Utara tanpa melanggar prinsip-prinsip dasarnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi keamanan Jepang dalam merespons ancaman Korea Utara pada periode 2015–2025. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan analisis data sekunder. Penelitian ini menggunakan kerangka teori *limited hard balancing* yang dikembangkan oleh T.V. Paul yang membagi strategi ini menjadi dua mekanisme utama: *limited arms buildup* dan *semi-formal alliances*. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Korea Utara tidak dipandang sebagai aktor great power, tetapi ancamannya berhasil mendorong Jepang melakukan pergeseran kebijakan pertahanan paling signifikan sejak Perang Dunia II. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jepang secara konsisten menerapkan kedua mekanisme tersebut sebagai respon terhadap ancaman Korea Utara. Melalui *limited arms buildup*, Jepang meningkatkan anggaran pertahanan dari batas historis satu persen menuju target dua persen PDB pada 2027. Jepang juga menginvestasikan sumber daya secara selektif pada kapabilitas defensif dan asimetris seperti sistem pertahanan rudal terintegrasi, *stand-off defense*, dan aset nirawak. Selain itu, Jepang juga memodernisasi sistem komando-kendali dan intelijen melalui pembentukan JSDF *Joint Operations Command*. Melalui *semi-formal alliances*, Jepang memperkuat kerja sama keamanan melalui pemberian akses pangkalan militer kepada Amerika Serikat, pertukaran intelijen dengan Korea Selatan melalui GSOMIA, serta koordinasi keamanan trilateral yang diperdalam melalui KTT Camp David 2023.

Kata kunci: Ancaman Nuklir; *Limited Hard Balancing*; Jepang; Korea Utara; Keamanan Asia Timur



ABSTRACT

The rapid advancement of North Korea's nuclear and ballistic missile programs following the enactment of Japan's New Security Bills in 2015 has increased threats to Japan's national security. However, constraints derived from Article 9 of the Japanese Constitution limit the use of military force, compelling Japan to adopt effective strategies to respond to North Korean threats without violating its foundational principles. This study aims to analyze Japan's security strategy in responding to the North Korean threat during the 2015–2025 period. It employs a qualitative method using secondary data analysis. The study applies the theoretical framework of limited hard balancing developed by T.V. Paul, which categorizes this strategy into two mechanisms: limited arms buildup and semi-formal alliances. The findings indicate that although North Korea is not viewed as a great power actor, its threats have pushed Japan to make the significant shift in defense policy since World War II. Japan has consistently implemented both mechanisms in response. Through limited arms buildup, Japan has increased its defense budget from the ceiling of one percent toward a target of two percent of GDP by 2027. Japan has invested in defensive and asymmetric capabilities, including integrated missile defense systems, stand-off defense, and unmanned assets. Furthermore, Japan has modernized command, control, and intelligence systems through the establishment of the JSDF Joint Operations Command. Through semi-formal alliances, Japan has strengthened security cooperation by providing base access to the United States, engaging in intelligence sharing with South Korea through GSOMIA, and deepening security coordination through the 2023 Camp David Summit.

Keywords: *East Asian Security; Japan; Limited Hard Balancing; North Korea; Nuclear Threat*

